

Negeri Berselimutkan Konspirasi

Oleh : Hendra Kurniawan

DI Indonesia ada tiga peristiwa penting yang terjadi tanggal 15 Januari pada tahun yang berbeda-beda. Tiga peristiwa ini tidak saling berhubungan dan terjadi dalam tiga nuansa politis yang jauh berbeda pula. Akan tetapi dapat ditemukan satu kesamaan yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Ketiga peristiwa tersebut menyempit perspektif lain yang tidak seperti pemahaman orang pada umumnya. Ketiganya diselubungi oleh upaya konspirasi politik. Maka tepat apabila negara ini disebut sebagai negeri yang penuh konspirasi.

Pertempuran Laut Aru

Peristiwa yang pertama terjadi pada tanggal 15 Januari 1962. Pada hari itu, meletuslah pertempuran di Laut Aru antara pasukan Republik melawan Belanda. Peristiwa ini terjadi dalam rangka misi Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pertempuran tidak seimbang ini menyebabkan tenggelamnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Macan Tutul dan menewaskan Komodor Josaphat Soedarso atau yang biasa dikenal sebagai Yos Sudarso. Pengorbanan Yos Sudarso benar-benar menunjukkan bahwa beliau seorang patriot bangsa yang rela menjadi tumbal demi keselamatan anak buahnya yang berada di dua kapal lainnya. Jenazahnya tenggelam, terkubur di kedalaman laut yang menjadi tempat pengabdianya. Peristiwa heroik ini kemudian diperingati sebagai Hari Dharma Samudera.

Sekilas tampaknya peristiwa kepahlawanan ini menjadi bagian dari sejarah bangsa yang wajar saja terjadi dalam suasana peperangan. Seseorang yang rela mati demi membela bangsa dan negara yang dicintainya. Sangat menarik ketika belum lama ini terbit sebuah buku berjudul *Konspirasi di Balik Tenggelamnya Matjan Tutul*. Dalam tulisannya ini, Julius Pour berusaha memaparkan adanya dugaan konspirasi politik dalam kematian Yos Sudarso.

Ada hal tak terduga bahwa ternyata sebelum keberangkatan Yos Sudarso bersama KRI Macan Tutul, beliau menyimpan beban psikologis.

Pertama, Yos Sudarso baru saja kehilangan bayi pertamanya. *Kedua*, sebagai orang nomor dua di TNI AL, Yos Sudarso merasa diragukan kemampuannya oleh Presiden Soekarno dalam mempersiapkan TNI AL merebut kembali Irian Barat. Perasa-

an inilah yang membuat Yos Sudarso nekat bergabung dalam operasi infiltrasi ke Irian Barat dipimpin oleh Kolonel (P) Soedomo. Yos Sudarso bertekad akan menanamkan Bendera Merah Putih di bumi Papua.

Sebelum peristiwa itu terjadi, Presiden Soekarno sempat menawarkan jabatan bagi Yos Sudarso. Perwira kharismatik ini bersedia dengan syarat Presiden Soekarno mengizinkaninya memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Tentu saja keberanian Yos Sudarso ini mengancam banyak pihak yang kemudian ingin menyingkirkan Yos Sudarso. Ada dugaan bahwa operasi yang diikuti Yos Sudarso ini sengaja dibocorkan agar Angkatan Laut Belanda tahu. Tujuannya supaya Belanda terpancing dan menyerang sehingga dunia internasional kemudian mengancam Belanda dan bersimpati pada perjuangan Indonesia. Akan tetapi ada pula yang menduga bahwa ada kepentingan pihak tertentu untuk menyingkirkan Yos Sudarso, salah satu perwira terbaik TNI AL yang bersih dan membenci korupsi.

Konspirasi Malari

Peristiwa tanggal 15 Januari yang berikutnya terjadi pada tahun 1974. Malapetaka 15 Januari yang biasa disebut Malari ini menurut pendapat umum dipicu oleh aksi demonstrasi mahasiswa yang menentang masuknya modal asing terutama Jepang. Akan tetapi disinyalir ada banyak kepentingan politik di balik itu semua. Dugaan adanya konspirasi politik dalam Peristiwa Malari terbukti bahwa pasca peristiwa ini, Presiden Soeharto memiliki kebijakan-kebijakan tertentu demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

Sikap Soeharto tidak lepas dari berbagai analisis politis terhadap Peristiwa Malari yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang melihatnya sebagai upaya kaum intelektual terutama mahasiswa untuk menyingkirkan peranan Asisten Pribadi (Aspri, sebelumnya disebut Spri - Staf Pribadi) Presiden Soeharto, utamanya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Aspri berisi tokoh-tokoh di balik layar pentas sejarah Orde Baru. Ali Moertopo sangat memainkan peran penting dalam berbagai kebijakan politik pemerintahan, sementara Soedjono

Hoemardani lebih banyak berperan dalam bidang perekonomian.

Ada pula pengamat yang menganalisis peristiwa Malari sebagai dampak dari rivalitas antara Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro yang menjabat sebagai Pangkopkamtib. Rivalitas keduanya disebut-sebut terkait dengan ambisi mereka untuk menggoyang kekuasaan Presiden Soeharto. Analisis ini bisa jadi ada benarnya. Terbukti bahwa dua lama setelah Malari, Presiden Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Pangkopkamtib, membubarkan Aspri, dan beberapa tahun kemudian Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani secara perlahan disingkirkan dari lingkaran kekuasaan.

Soeharto lengser

Konspirasi yang terakhir terjadi pada tanggal 15 Januari 1998. Ini merupakan konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan kepentingan negara-negara Barat. Hari itu Presiden Soeharto terpaksa menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan IMF. Ini akibat dari benturan krisis ekonomi yang menghantam Indonesia sejak tahun 1997. Indonesia butuh dana segar. Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, menyaksikan momen penandatanganan sambil menyilangkan kedua lengannya di dada. Camdessus terlihat pongah mengawasi Presiden Soeharto yang tengah membungkuk menandatangani perjanjian utang. Peristiwa ini seolah hendak memperlihatkan Soeharto tunduk pada IMF, salah satu pilar kapitalisme global.

Tekanan IMF dan Amerika Serikat memunculkan dugaan dari para pemikir Barat bahwa ada kepentingan untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto. Menurut perspektif ini, krisis di Indonesia bukan semata-mata karena kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto tetapi juga peranan IMF. Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan lebih disebabkan oleh tekanan pasar keuangan internasional dan IMF. Amerika Serikat sengaja memanfaatkan ambruknya ekonomi Indonesia sebagai sarana untuk menggusur Soeharto. Meskipun analisis ini dapat dibilang masih dangkal, yang jelas IMF menjadi pembuka bagi lebih leluasanya modal asing masuk ke Indonesia. Berbagai perusahaan asing begitu mudah berbisnis di Indonesia dari bank,

restoran, perusahaan multinasional, dan berbagai gerai yang menjual produk luar negeri.

Upaya konspirasi untuk menyingkirkan orang bersih demi menutupi aib korupsi, mendepak orang yang mengancam kekuasaan, hingga melengserkan orang yang dianggap akan mengganggu suatu kepentingan ternyata sudah sejak dulu mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Tentu tidak semua hal yang berbau konspirasi terbuka untuk konsumsi publik. Semua berawal dari adanya pemungkitan lain dan hasil analisis para pengamat. Jika ditarik garis ke masa sekarang, tampaknya konspirasi masih dan akan terus terjadi di negara ini.

Sebut saja kasus Century yang masih misteri karena diduga melibatkan para pejabat negara. Rudi Rubiandini dengan masalah korupsi di SKK Migas yang juga banyak menyebut para petinggi di Kementerian ESDM. Belum lagi soal Akil Mochtar yang konspirasinya mulai terkuak dengan ditahannya Ratu Atut, sang penguasa Banten.

Terakhir yang masih hangat yaitu dugaan adanya konspirasi politik dalam kasus Hambalang yang telah menyeret Anas Urbaningrum ke tahanan KPK. Muncul berbagai nama yang statusnya abu-abu seperti Bunda Putri dan Sengman yang diduga dekat dengan lingkaran kekuasaan Cikeas. Untuk itulah konspirasi-kali Anas menolak dipanggil KPK dengan alasan adanya akal-akalan politik di balik semua ini. Pasca resmi ditahan KPK, melalui gaya bahasa sarkasme yang dilontarkannya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini semakin mengindikasikan keterlibatan Puri Cikeas.

Semoga semua konspirasi dan kebusukan pihak-pihak yang berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya segera diakhiri dan kebenaran terkuak. Sudah saatnya kita bersinergi memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Pemilu sudah di depan mata. Jangan sampai selalu muncul upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berkemauan baik, bersih, dan memiliki komitmen sungguh bagi negara dan bangsa ini melalui *black campaign* atau sejenisnya. Akhirnya kita tunggu saja sampai kapan negeri ini lepas dari selimut konspirasi yang memuakkan. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.